BAB IV

GAMBARAN SUNYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Subjek Penelitian

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan yang disebut sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah terdaftar dan memiliki NPWP bagi orang pribadi untuk melaporkan jumlah pajak terutanganya.

Subjek penelitian yang diteliti oleh penelitian ini adalah Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Kemiri, Sidoarjo. Wajib Pajak yang dipilih yaitu masih aktif membayar pajaknya dan memiliki NPWP. Pada penelitian ini data diambil dengan 40 responden di daerah Perumahan Graha Kuncara Desa Kemiri sidoarjo yang sampelnya dipilih secara acak. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi langsung dan memilih responden dan memastikan masih aktif membayar pajak.

Tabel 4.1
Distribusi Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang kembali	42
Kuesioner yang tidak kembali	-
Total kuesioner yang dibagikan	42

Sumber : Hasil pengumpulan kuesioner

Berdasarkan penjelasan Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 40 kuesioner yang dibagikan dan semua kuesioner kembali dengan lengkap. Itu karena peneliti langsung mendatangi Wajib Pajaknya.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

4.2.1.1 Karakteristik Responden

Pada sub bab ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan kuesioner dengan mengambil sampel 40 responden Wajib Pajak. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara membagikan lembaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar serta yang melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakan di Kantor Pajak Sidoarjo yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian dari data-data hasil kuesioner tersebut di olah untuk

mendapatkan karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan dan kepemilikan NPWP. Rangkuman dari karakteristik responden tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

1. Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

DESKRIPTIF KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA

Usia (Thn)	Jumlah	Prosentase
20-30 thn	2	4.8
31-40 thn	2	4.8
41-50 thn	12	28.6
>50 thn	26	61.9
Jumlah	42	100.0

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan usia, diketahui bahwa responden dengan rentang usia 20-30 thn yaitu berjumlah 2 (4,8 %), sebanyak 2 responden (4,8%) memiliki rentang usia 31-40 thn, kemudian rentang usia 41-50 thn sebanyak 12 responden (28,6%), dan dengan rentang usia >50 thn sebanyak 26 responden (66,9%) adalah yang terbanyak. Rata – rata responden berusia 53 tahun.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3

DESKRIPTIF KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki – laki	39	92.9
Perempuan	3	7.1
Jumlah	42	100.0

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa dari jumlah total sebanyak 42 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang diteliti dengan nilai terbesar adalah laki-laki sebanyak 39 orang atau 92,9%, sedangkan sisanya sebanyak 3 orang atau 7,1% adalah berjenis kelamin perempuan.

3. Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4.4

DESKRIPTIF KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN KEPEMILIKAN NPWP

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
IYA	42	100.0
Jumlah	42	100.0

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan kepemilikan NPWP, diketahui bahwa responden yang digunakan oleh peneliti sebanyak 42 responden adalah memiliki NPWP dengan jumlah 42 responden (100%), sedangkan yang tidak memiliki NPWP berjumlah 0 (0%).

4. Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.5

DESKRIPTIF KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN

Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
PNS	5	11.9
Wirausaha	1	2.4
Swasta	35	83.3
TNI/ Polri	1	2.4
Jumlah	42	100.0

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan pekerjaan, diketahui bahwa responden dengan pekerjaan yang paling banyak yaitu swasta yaitu berjumlah 35 responden (83,3 %), responden yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 5 responden (11,9%), kemudian pekerjaan wirausaha sebanyak 1 responden (2,4%), dan dengan pekerjaan TNI/Polri sebanyak 1 responden (2,4%).

5 Deskripsi Variabel Penelitian

1. Deskripsi Jawaban responden

Untuk mendeskripsikan variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1) , Pengetahuan Peraturan Pajak (X2) , Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3), Kualitas Pelayanan (X4) , Sanksi Perpajakan (X5) , Kepatuhan Membayar Pajak (Y1) akan digunakan tabel frekuensi dan nilai mean (rata-rata) jawaban responden pada masing – masing butir pertanyaan.

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Tertingg}-\text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Nilai interval kelas tersebut digunakan untuk menentukan nilai masing – masing kelas dan kemudian nilai dari masing – masing responden akan dimasukkan dalam kategori kelas seperti tabel 4.6.

Tabel 4.6

KATEGORI MEAN DARI SKOR INTERVAL

INTERVAL	KATEGORI
1.00 < a < 1.80	Sangat Tidak Setuju
1.81 < a < 2.60	Tidak Setuju
2.61 < a < 3.40	Netral
3.41 < a < 4.20	Setuju
4.20 < a < 5.00	Sangat Setuju

Berikut adalah hasil perhitungan proporsi dan nilai mean jawaban responden dari hasil pengujian tersebut :

1. Kesadaran Membayar Pajak

Variabel Kesadaran Membayar Pajak terdiri dari 6 indikator dengan skala pengukuran 1 sampai 5 dan terdiri dari 4 pertanyaan. Berikut hasil perhitungan proporsi yang ditampilkan dalam bentuk Prosentase dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7

DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN PADA VARIABEL KESADARAN MEMBAYAR PAJAK

No.	Uraian	Skor Jawaban (%)					Mean	Kategori
		1	2	3	4	5		
1.	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.	-	-	7,5	30	62,5	4,55	Sangat Setuju
2.	Pajak merupakan pengabdian masyarakat kepada negara.	-	-	5	25	70	4,65	Sangat Setuju
3.	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.	-	-	2,5	15	82,5	4,8	Sangat Setuju
4.	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangandapat merugikan negara.	-	-	2,5	15	82,5	4,8	Sangat Setuju
5.	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.	-	-	2,5	27,5	70	4,675	Sangat Setuju
6.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.	-	-	5	47,5	47,5	4,425	Sangat Setuju
Mean							4,65	Sangat Setuju

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan tanggapan responden tentang variabel Kesadaran Membayar Pajak yang mempunyai nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,65 yang termasuk dalam kategori sangat setuju. Angka jawaban rata-rata tertinggi variabel Kesadaran Membayar Pajak terletak pada indikator pertanyaan ke 3 dan 4 yaitu sebesar 4,8 yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negaradan Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara, hal ini mengidentifikasi bahwa responden sangat setuju pajak merupakan penerimaan negara terbesar dan Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.

2. Pengetahuan Peraturan Pajak

Variabel Kesadaran Membayar Pajak terdiri dari 7 indikator dengan skala pengukuran 1 sampai 5 dan terdiri dari 7 pertanyaan. Berikut hasil perhitungan proporsi yang ditampilkan dalam bentuk Prosentase dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8

**DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN PADA VARIABEL
PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK**

No.	Uraian	Skor Jawaban (%)					Mean	Kategori
		1	2	3	4	5		
1.	Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.	-	-	-	67,5	32,5	4,325	Sangat Setuju
2.	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat	-	-	2,5	65	32,5	4,3	Sangat Setuju
3.	Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar.	-	20	47,5	25	12,5	3,25	Setuju
4.	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya	-	12,5	52,5	17,5	17,5	3,4	Setuju
5.	Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).	-	2,5	7,5	57,5	32,5	4,2	Setuju
6	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi	-	-	-	55	45	4,45	Sangat Setuju
7	Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan	-	-	2,5	72,5	25	4,45	Sangat Setuju
Mean							4,053	Setuju

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mempunyai nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,053 yang termasuk dalam kategori setuju. Rata-rata jawaban tertinggi terletak pada indikator pertanyaan ke 6 dan 7 yaitu Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi dan pajak tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat dengan angka rata-rata 4,45 . Pada hal ini dapat dijelaskan responden setuju dalam mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak..

3. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terdiri dari 5 indikator dengan skala pengukuran 1 sampai 5 dan terdiri dari 5 pertanyaan. Berikut hasil perhitungan proporsi yang ditampilkan dalam bentuk Prosentase dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9

DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN PADA VARIABEL PERSEPSI
EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN

No	Uraian	Skor Jawaban (%)					Mean	Kategori
		1	2	3	4	5		
1.	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah, aman, dan terpercaya.	-	-	-	80	20	4,2	Setuju
2.	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> sangat efektif.	-	-	7,5	67,5	25	4,175	Setuju
3.	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan Wajib Pajak.	-	-	32,5	50	17,5	3,85	Setuju
4.	Peraturan pajak terbaru dapat di <i>update</i> melalui internet dengan mudah dan cepat.	-	-	2,5	72,5	25	4,225	Sangat Setuju
5.	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui <i>e-Registration</i> dari <i>website</i> pajak.	-	-	-	75	25	4,25	Sangat Setuju
Mean							4,14	Setuju

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,14. Rata – rata jawaban tertinggi terletak pada indikator pertanyaan ke 5 yaitu sebesar 4,25 bahwa Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e-Registration* dari *website* pajak. pada hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya peraturan pajak terbaru dapat melakukan pendaftaran melalui *e-Registration* dari *website* pajak.

4. Kualitas Pelayanan

Variabel Kualitas Pelayanan terdiri dari 6 indikator dengan skala pengukuran 1 sampai 5 dan terdiri dari 6 pertanyaan. Berikut hasil perhitungan proporsi yang ditampilkan dalam bentuk Prosentase dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN PADA VARIABEL
KUALITAS PELAYANAN

No	Uraian	Skor Jawaban (%)					Mean	Kategori
		1	2	3	4	5		
1.	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak..	-	2,5	47,5	25	25	3,725	Setuju
2.	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak.	-	20	32,5	22,5	25	3,525	Setuju
3.	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat	-	-	10	70	20	4,1	Setuju
4.	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak	-	-	-	82,5	17,5	4,175	Setuju
5.	Fasilitas Call Center atau Kring Pajak adalah salah satu sarana bertanya Wajib Pajak selain datang ke KPP.	-	-	-	80	20	4,2	Setuju
6.	Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.	-	2,5	-	40	57,5	4,525	Sangat Setuju
Mean							4,041	Setuju

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,041. Rata – rata jawaban tertinggi terletak pada indikator pertanyaan ke 6, yaitu sebesar 4,525 bahwa Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.

5. Sanksi Perpajakan

Variabel Sanksi Perpajakan terdiri dari 5 indikator dengan skala pengukuran 1 sampai 5 dan terdiri dari 5 pertanyaan. Berikut hasil perhitungan proporsi yang ditampilkan dalam bentuk Prosentase dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.11
**DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN PADA VARIABEL SANKSI
 PERPAJAKAN**

No.	Uraian	Skor Jawaban (%)					Mean	Kategori
		1	2	3	4	5		
1.	Sanksi Perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.	-	-	2,5	22,5	75	4,725	Sangat Setuju
2.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.	-	-	5	17,5	77,5	4,725	Sangat Setuju
3.	Pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap bagi yang melanggar	-	-	2,5	15	82,5	4,8	Sangat Setuju
4.	Penegakan Sanksi kepada dikenakan pelanggarnya tanpa toleransi	-	7,5	37,5	55	-	3,475	Setuju
5.	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan yang akan di kenakan bagi yang melanggar	-	15	25	60	-	3,45	Setuju
Mean							4,235	Sangat Setuju

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,235. Rata – rata jawaban tertinggi terletak pada indikator pertanyaan ke 3 yaitu sebesar

4,8 bahwa Pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap bagi yang melanggar .

6. Kepatuhan Membayar Pajak

Variabel Kepatuhan Membayar Pajak terdiri dari 5 indikator dengan skala pengukuran 1 sampai 5 dan terdiri dari 5 pertanyaan. Berikut hasil perhitungan proporsi yang ditampilkan dalam bentuk Prosentase dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12

DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN PADA VARIABEL KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

No.	Uraian	Skor Jawaban (%)					Mean	Kategori
		1	2	3	4	5		
1.	Saya Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban Saya sebagai warga Negara yang baik	-	-	7,5	42,5	50	4,425	Sangat Setuju
2	Saya akan melaporkan SPT tepat pada waktunya	-	-	10	50	40	4,3	Sangat Setuju
3	Saya akan menghitung pajak terhutang dengan jujur dan benar	-	-	7,5	60	32,5	4,25	Sangat Setuju
4	Saya sebagai wajib pajak patuh bayar pajak	-	-	7,5	42,5	50	4,425	Sangat Setuju
5	Saya sebagai wajib pajak patuh membayar sanksi administrasi	-	-	7,5	62,5	27,5	4,25	Sangat Setuju
Mean							4,33	Sangat Setuju

Sumber : Lampiran 3 diolah

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang variabel Kepatuhan Membayar Pajak mempunyai nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,33. Rata – rata jawaban tertinggi terletak pada indikator pertanyaan ke 1, dan 4 yaitu sebesar 4,425 bahwa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang baik dan sebagai Wajib Pajak patuh membayar pajak .

1.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji Validitas dapat juga dilakukan dengan melakukan korelasi bivariante antara masing – masing pertanyaan dengan total skor konstrok (Hariyadi, 2010:78) .

Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing – masing butir pertanyaan pada variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1) :

Tabel 4.13
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KESADARAN MEMBAYAR
PAJAK

Pertanyaan	Signifikan <i>Correlations</i>	Nilai Kritis	Keterangan
X1.1	0,000	0.05	Valid
X1.2	0,000	0,05	Valid
X1.3	0,000	0.05	Valid
X1.4	0,000	0.05	Valid
X1.5	0,000	0.05	Valid
X1.6	0,000	0.05	Valid

Sumber : Lampiran 4 diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa signifikansi korelasi antara masing – masing indikator pertanyaan terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang valid atau kurang dari 0,05. Dengan demikian semua pertanyaan variabel Kesadaran Membayar Pajak yang berjumlah 6 butir digunakan dalam proses analisis selanjutnya.

Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing – masing butir pertanyaan pada variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X2) :

Tabel 4.14

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK

Pertanyaan	Signifikan <i>Correlations</i>	Nilai Kritis	Keterangan
X1.1	0.019	0.05	Valid
X1.2	0.000	0,05	Valid
X1.3	0.000	0.05	Valid
X1.4	0.000	0.05	Valid
X1.5	0.001	0.05	Valid
X1.6	0.000	0.05	Valid
X1.7	0.000	0.05	Valid

Sumber : Lampiran 4 diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa signifikansi korelasi antara masing – masing indikator pertanyaan terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang valid atau kurang dari 0,05. Dengan demikian semua pertanyaan variabel Pengetahuan Peraturan Pajak yang berjumlah 7 butir digunakan dalam proses analisis selanjutnya

Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing – masing butir pertanyaan pada variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) :

Tabel 4.15

**HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PERSEPSI EFEKTIFITAS
SISTEM PERPAJAKAN**

Pertanyaan	Signifikan <i>Correlations</i>	Nilai Kritis	Keterangan
X1.1	0,000	0.05	Valid
X1.2	0,000	0,05	Valid
X1.3	0,000	0.05	Valid
X1.4	0,000	0.05	Valid
X1.5	0,000	0.05	Valid
X1.6	0,000	0.05	Valid

Sumber : Lampiran 4 diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa signifikansi korelasi antara masing – masing indikator pertanyaan terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang valid atau kurang dari 0,05. Dengan demikian semua pertanyaan variabel Persepsi Efektifitas SistemPerpajakan yang berjumlah 7 butir digunakan dalam proses analisis selanjutnya.

Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing – masing butir pertanyaan pada variabel Kualitas Pelayanan (X4) :

Tabel 4.16

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KUALITAS PELAYANAN

Pertanyaan	Signifikan <i>Correlations</i>	Nilai Kritis	Keterangan
X1.1	0,000	0.05	Valid
X1.2	0,000	0,05	Valid
X1.3	0,000	0.05	Valid
X1.4	0,002	0.05	Valid
X1.5	0,000	0.05	Valid
X1.6	0,002	0.05	Valid
X1.7	0,000	0.05	Valid

Sumber : Lampiran 4 diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa signifikansi korelasi antara masing – masing indikator pertanyaan terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang valid atau kurang dari 0,05. Dengan demikian semua pertanyaan variabel Kualitas Pelayanan yang berjumlah 7 butir digunakan dalam proses analisis selanjutnya.

Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing – masing butir pertanyaan pada variabel Sanksi Perpajakan (X5) :

Tabel 4.17

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL SANKSI PERPAJAKAN

Pertanyaan	Signifikan <i>Correlations</i>	Nilai Kritis	Keterangan
X1.1	0.000	0.05	Valid
X1.2	0.000	0,05	Valid
X1.3	0.000	0.05	Valid
X1.4	0.000	0.05	Valid
X1.5	0.000	0.05	Valid
X1.6	0.000	0.05	Valid
X1.7	0.000	0.05	Valid

Sumber : Lampiran 4 diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa signifikansi korelasi antara masing – masing indikator pertanyaan terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang valid atau kurang dari 0,05. Dengan demikian semua pertanyaan variabel Sanksi Perpajakan yang berjumlah 7 butir digunakan dalam proses analisis selanjutnya.

Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing – masing butir pertanyaan pada variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y) :

Tabel 4.18

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

Pertanyaan	Signifikan <i>Correlations</i>	Nilai Kritis	Keterangan
X1.1	0.000	0.05	Valid
X1.2	0.000	0,05	Valid
X1.3	0.000	0.05	Valid
X1.4	0.000	0.05	Valid
X1.5	0.000	0.05	Valid

Sumber : Lampiran 4 diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa signifikansi korelasi antara masing – masing indikator pertanyaan terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang valid atau kurang dari 0,05. Dengan demikian semua pertanyaan variabel Kepatuhan Membayar Pajak yang berjumlah 5 butir digunakan dalam proses analisis selanjutnya.

2. Uji Reabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Hariyadi ,2010:82). Uji reliabelitas ini dilakukan dengan metode uji statistik *Cronbach's Alpha*. Jika koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7 maka instrument

dinyatakan reliabel (Hariyadi ,2010:82). Berikut hasil pengujian reliabilitas pada masing – masing variabel penelitian :

Tabel 4.19

HASIL UJI RELIABILITAS MASING – MASING VARIABEL

Variabel Penelitian	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	0.760	0.7	Reliabel
Pengetahuan Peraturan Pajak	0.724	0,7	Reliabel
Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	0.802	0.7	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0.712	0.7	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0.777	0.7	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak	0.758	0.7	Reliabel

Sumber : Lampiran 5 diolah

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa besarnya *Cronbach's Alpha* pada variabel Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak , Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan , Sanksi Perpajakan , dan Kepatuhan Membayar Pajak lebih besar dari 0,7 dengan demikian butir – butir pertanyaan dalam kuesioner adalah reliabel.

1.2.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini, dapat menggunakan uji Kolmogrov Smirnov (K-S). Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis yang diuji sebagai berikut :

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas (signifikansi) > 0,05, maka H₀ diterima yang artinya data residual berdistribusi normal (Hariyadi,2010:83). Hasil perhitungan didapatkan nilai signifikansi uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S) sebagai berikut :

Tabel 4.20

HASIL NILAI SIGNIFIKANSI UJI KOLMOGOROV SMIRNOV

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.92547266
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.074
	Negative	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		.748
Asymp. Sig. (2-tailed)		.630

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *uji Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,748 dengan signifikansi pada 0,630 yang nilainya

lebih dari nilai $\alpha = 0,05$ hal ini berarti menerima H_0 atau kesemua variabel independent dan dependent berdistribusi normal.

1.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Kesadaran Membayar Pajak , Pengetahuan Peraturan Pajak , Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan , dan Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Graha Kuncara Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo yang terdaftar pada Kantor Pajak Kecamatan Sidoarjo.

1.2.5 Analisis Model

Tabel 4.21

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA VARIABEL BEBAS TERHADAP VARIABEL TERGANTUNG

Variabel	Koefisien
Konstanta	45.362
Kesadaran Membayar Pajak (X1)	-0,050
Pengetahuan Peraturan Pajak (X2)	-0,032
Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3)	-0,627
Kualitas Pelayanan (X4)	-0,014
Sanksi Perpajakan (X5)	-0.468
Adjusted R Square	

Sumber : Lampiran 7 diolah

Model regresi linier berganda yang diperoleh adalah :

$$Y = 45.362 - 0.050 X_1 - 0.032 X_2 - 0.627 X_3 - 0,014 X_4 - 0.468 X_5 + e$$

Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel uraian berikut ini :

a) Konstanta

Nilai konstanta sebesar adalah apabila variabel bebas X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5 konstan, maka diprediksikan Y adalah sebesar 45,362

b) Koefisien Regresi

- 1) Nilai koefisien regresi variabel X_1 adalah sebesar -0.050 artinya jika X_1 naik satu satuan maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0.050
- 2) Nilai koefisien regresi variabel X_2 adalah sebesar -0.032 artinya jika X_2 naik satu satuan maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0.032
- 3) Nilai koefisien regresi variabel X_3 adalah sebesar -0.681 artinya jika X_3 naik satu satuan maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0.681
- 4) Nilai koefisien regresi variabel X_4 adalah sebesar -0,014 artinya jika X_4 naik satu satuan maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0,014
- 5) Nilai koefisien regresi variabel X_5 adalah sebesar -0.468 artinya jika X_5 naik satu satuan maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0.468

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin bagus penelitian adalah jika nilai *adjusted R square* menunjukkan angka mendekati 1

yang artinya hampir semua variabel independen memberikan informasi dalam memprediksi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.22

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.495(a)	.245	.140	2.05484

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Membayar Pajak , Pengetahuan Peraturan Pajak , Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan , dan Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari tabel tersebut besarnya adjusted R^2 adalah 0,140 hal ini berarti 14% variasi kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan atau dapat dipengaruhi oleh variasi kelima variabel independen, sedangkan sisanya ($100\% - 14\% = 86\%$) dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain diluar model.

2. Pengujian Hipotesis (Uji F)

Menurut Hariyadi (2010:86), Uji F dilakukan untuk mengetahui persamaan regresi merupakan model yang fit atau tidak.

$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$, berarti bahwa model persamaan regresi dinyatakan tidak fit

$H_t : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$, berarti bahwa model persamaan regresi dinyatakan fit

Untuk membuktikan hipotesis di atas maka lakukan uji F, berdasarkan hasil uji F sesuai perhitungan dengan menggunakan software SPSS v.16 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.23

**HASIL PENGUJIAN SECARA UJI STATISTIK F
ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	49.328	5	9.866	102.337	.000(a)
	Residual	152.005	36	4.222		
	Total	201.333	41			

a Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak

b Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber : Lampiran 7 diolah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 102.337 lebih besar dari F tabel sebesar 2,49 ($df = 36$, $n = 5$, $\alpha = 0,05$) dengan probabilitas signifikansi 0.000. karena F hitung lebih besar dari F tabel dan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa model persamaan regresi dinyatakan fit atau dapat disimpulkan dengan menerima H_t .

3. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Menurut Fahrury (2010:87), Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen.

$H_0 : b_i = 0$, berarti variabel – variabel independen (Kesadaran Membayar Pajak , Pengetahuan Peraturan Pajak , Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan , dan Sanksi Perpajakan) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (kepatuhan membayar pajak).

$H_t : b_i \neq 0$, berarti variabel – variabel independen (Kesadaran Membayar Pajak , Pengetahuan Peraturan Pajak , Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan , dan Sanksi Perpajakan) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (kepatuhan membayar pajak).

Untuk membuktikan hipotesis di atas maka dilakukan uji t, berdasarkan hasil uji t sesuai perhitungan dengan menggunakan software SPSS v.16 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.24

HASIL PENGUJIAN SECARA UJI STATISTIK t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	45.362	11.627		3.902	.000
Kesadaran Membayar Pajak	-.050	.235	-.045	-.212	.833
Pengetahuan Peraturan Pajak	-.032	.201	-.042	-.160	.874
Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	-.627	.257	-.563	-2.441	.020
Kualitas Pelayanan	-.014	.155	-.017	-.090	.929
Sanksi Perpajaka	-.468	.279	-.382	-1.679	.102

a Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber : Lampiran 7 diolah

1. Uji antara Kesadaran membayar pajak dengan Kepatuhan Membayar Pajak menunjukkan nilai t hitung = -0.212 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,69092 ($df = 36, \alpha = 0.05$) dari tabel tersebut juga diperoleh signifikansi sebesar 0.833 dengan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Membayar Pajak tidak dapat dipengaruhi secara parsial oleh Kesadaran Membayar Pajak atau diartikan dengan menerima H_0 .

2. Uji antara Pengetahuan Peraturan Pajak dengan Kepatuhan Membayar Pajak menunjukkan nilai t hitung = -0.160 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,69092 ($df = 36$, $\alpha = 0.05$) dari tabel tersebut juga diperoleh signifikansi sebesar 0,874 yang berarti signifikansinya lebih besar dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Membayar Pajak tidak dapat dipengaruhi secara parsial oleh Pengetahuan Peraturan Pajak atau diartikan dengan menerima H_0 .
3. Uji antara Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Membayar Pajak menunjukkan nilai t hitung = -2.441 lebih besar dari t tabel sebesar 1,69092 ($df = 36$, $\alpha = 0.05$) dari tabel tersebut jug diperoleh signifikansi sebesar 0,020 yang berarti signifikansinya lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa KepatuhanMembayar Pajak dapat dipengaruhi secara parsial oleh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan atau diartikan dengan menerima H_a .
4. Uji antara Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Membayar Pajak menunjukkan nilai t hitung = -0.090 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,69092 ($df=36$, $\alpha = 0.05$) dari tabel tersebut jug diperoleh signifikansi sebesar 0.929 yang berarti signifikansinya lebih besar dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa KepatuhanMembayar Pajak tidak dapat dipengaruhi secara parsial oleh Kualitas Pelayanan atau diartikan dengan menerima H_0 .
5. Uji antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Membayar Pajak menunjukkan nilai t hitung = -1.679 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,69092 ($df=36$, $\alpha = 0.05$) dari tabel tersebut jug diperoleh signifikansi sebesar 0.102 yang berarti signifikansinya dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa

Kepatuhan Membayar Pajak tidak dapat dipengaruhi secara parsial oleh Sanksi Perpajakan atau diartikan dengan menerima H_0 .

4.2 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak pada Wajib Pajak Pribadi. Pada penelitian ini, menyebarkan kuesioner di Perumahan Graha Kuncara Desa Kemiri Sidoarjo yang Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pajak Kecamatan Sidoarjo. Pembahasan selanjutnya mengenai jawaban hipotesis atas faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar kepatuhan untuk membayar pajak pada Wajib Pajak Pribadi.

Uji normalitas menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan data berdistribusi normal dengan nilai sig. Kolmogorov smirnov 0,748 lebih besar 0,05. Berdasarkan analisis uji model (uji F) menunjukkan bahwa model fit dari faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk membayar pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai *adjusted R Square* pada koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 14% sedangkan sisanya 86% dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar penelitian ini.

Hasil analisis regresi (uji-t) menunjukkan bahwa kesadaran untuk membayar pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak,

sedangkan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada tingkat signifikansi lima persen (0,05). Berikut adalah pembahasan masing-masing variabel independen.

4.3.1 Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak membayar pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat berarti semakin tinggi pula tingkat kepatuhan membayar pajak hal yang meliputi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yaitu pemahaman tentang perpajakan dan sanksi pajak yang seharusnya terus disosialisasikan agar pengetahuan masyarakat tentang pajak dapat mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak..

Dari hasil analisis uji t diperoleh hasil kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak yang artinya tingkat kesadaran perpajakan di Graha Kuncara khususnya pada hal membayar pajak masih tergolong rendah. Dilihat dari hasil beta dengan nilai -0,050 yang artinya dengan standar coefficients 0,235 dengan hasil negatif tingkat kesadaram untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi masih rendah sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya . Hal tersebut dikarenakan perilaku masyarakat masih jauh dari rasa peduli pada negara, ketidaksadaran dari mebayar pajak akan mengurangi rasa patuh pada ketaatan peraturan pajak yang berlaku. Masyarakat beranggapan bahwa hasil pemungutan

pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Anggapan seperti inilah yang menyebabkan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Selain itu, tergantung pada sikap patuh yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri, sampai sejauh mana wajib pajak mau untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak tentang perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pihak KPP diharapkan lebih bekerja keras untuk meningkatkan lagi kesadaran pada Wajib Pajak dengan mengadakan sosialisasi secara berkala agar dapat meningkatkan lagi penerimaan negara pada sektor perpajakan terutama pada Orang Pribadi.

4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

Pengetahuan peraturan pajak yaitu pemahaman mengenai peraturan perpajakan, yaitu: kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Dilihat dari hasil beta dengan nilai $-0,032$ dan standar coefficients $0,201$ dengan hasil negatif tingkat pengetahuan peraturan pajak pada

wajib pajak orang pribadi masih rendah sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Di jelaskan bahwa pengetahuan tentang peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan untuk membayar pajak, meskipun Wajib Pajak Orang Pribadi memahami tentang peraturan pajak , tidak halnya dalam pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan masih kurang. Dalam hal ini masyarakat sebagian besar lambat dalam mengetahui peraturan tentang pajak baik yang telah diperbarui maupun tidak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan untuk patuh membayar pajak .

Penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pardi, 2011) Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu,kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak. Tidak semua masyarakat paham dan mengetahui aturan – aturan perpajakan, hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang taat dan bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, tepat waktu serta keinginan untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki). Bagi yang sudah memiliki NPWP, Wajib Pajak diharapkan lebih maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya..

4.3.3 Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain : adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling, pembayaran melalui e-banking yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-registration dari website pajak. Dilihat dari hasil beta dengan nilai -0,627 dan standar coefficients 0,257 dengan hasil negatif, tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi masih rendah dengan hasil beta negatif persepsi efektifitas sistem perpajakan adalah variabel yang mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan adanya suatu sistem terpadu dalam perpajakan hal tersebut tentunya akan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memematuhi kewajiban pajaknya dengan mudah dan cepat tanpa harus ke KPP dimana Wajib Pajak itu terdaftar. Manfaat yang dapat didapat dari adanya sistem tersebut adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan, citra dari Direktorat Jendral Pajak pun dapat meningkat dengan adanya sistem tersebut. Menurut responden, kebijakan DJP tentang sistem administrasi perpajakan modern dengan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan teknologi

informasi antara lain e-felling, e-SPT, e-Registration dapat memberikan kemudahan yang baik bagi Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern dilakukan untuk mencapai tempat sasaran utama yaitu optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan sukarela dimana kemauan juga termasuk didalamnya, efisiensi administrasi, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tatiana dan Priyo (2009) yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

4.3.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus (Ni Luh Supadmi, 2009). Secara garis besar instansi-instansi pemerintah biasanya dikembangkan untuk dua hal. Pertama untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengadministrasian, dan pengawasan yang berkaitan dengan kewajibankewajiban kenegaraan; dan kedua, untuk memberikan pelayanan umum. Pelanggan memilih untuk meminta pelayanan dari instansi pemerintah, antara lain karena motif-motif yang berkaitan dengan keharusan melaksanakan kewajiban kepada negara hanya melalui

instansi pemerintah tertentu saja, misalnya pelayanan untuk pembayaran pajak (Sartika dan Rini 2010) .

Dilihat dari hasil beta dengan nilai $-0,014$ dan standar coefficients $0,155$ dengan hasil negatif, tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi masih rendah sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Di simpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan untuk membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan peningkatan kualitas pelayanan diharapkan akan menumbuhkan rasa kesadaran kepada masyarakat untuk mau membayar pajak yang kemudian akan membawa dampak yang positif pada pendapatan negara. Meningkatnya penerimaan pajak khususnya pada orang pribadi yang selama ini menjadi primadona pendapatan negara dapat memberikan arti positif bagi pembangunan negara. Peningkatan penerimaan pajak negara dapat dijadikan elemen penting penilaian bahwa kinerja organisasi dengan segenap pelayanan yang berkualitas dan kinerja pegawainya sudah menunjukkan hasil yang baik.

Penelitian ini juga didukung pernyataan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Luh Supadmi (2009) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparatur pajak. Berdasarkan hal tersebut, kualitas pelayanan yang diberikan oleh setiap petugas pajak, maka pihak kantor pajak perlu memperhatikan secara seksama akan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

4.3.5 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan membayar Pajak

Gambaran sanksi perpajakan pada lingkungan yaitu dapat terjadi pada seorang wajib pajak Orang Pribadi yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak dari wajib pajak Orang Pribadi. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak Orang Pribadi dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Dalam penelitian ini sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan untuk membayar pajak, dilihat dari hasil beta dengan nilai -0,468 dan standar coefficients 0,279 dengan hasil negatif, tingkat pengetahuan sanksi pajak yang dipahami oleh wajib pajak orang pribadi masih rendah sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya kurangnya perhatian masyarakat terhadap peraturan dan sanksi yang diberlakukan. Sanksi perpajakan tidak menjamin perilaku masyarakat untuk mematuhi peraturan karena kurang tegasnya sanksi yang dikenakan. Sanksi yang diterapkan hanya sebagai teguran, tingkat sanksi dimata masyarakat masih tergolong rendah sehingga kepatuhan membayar pajak masih kurang diperhatikan.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian,

diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak Orang Pribadi akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Arum, 2012).

Hasil keseluruhan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dari kelima variabel bebas (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan) hanya pada variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, yang memberikan hasil berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dimasyarakat sangat diperhatikan dalam membayar pajaknya karena semakin mudah dan canggih untuk membayar pajak semakin patuh atau bisa dikatakan rajin untuk melaporkan SPT nya. Pemerintah pusat maupun daerah terutama bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan yaitu dengan mengadakan sosialisasi secara rutin dengan memberikan pengetahuan sitem yang sedang dijalankan atau berkembang. Adapun variabel lainnya (kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan) memberikan hasil yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi terutama pada Perumahan Graha Kuncara Desa Kemiri Sidoarjo tidak ada respon terhadap kepatuhan untuk membayar pajak . sikap ketaatan masyarakat tidak terpengaruh pada pengetahuan peraturan pajak, kualitas pajak dan sanksi perpajakan. meskipun masyarakat memahami atau

mengetahui tentang perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi telah memahami peraturan perpajakan serta didukung dengan adanya sistem perpajakan yang ada saat ini Wajib Pajak merasa dimudahkan dalam melakukan kewajibannya salah satunya yaitu dengan adanya drop box yang membantu Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan perpajakannya tanpa harus berlama-lama mengantri atau ke kantor pajak pada jam kerja.